

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

**ZURYATI
NPM: 1951010240**

Program Pendidikan : Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/ 2024 M**

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Diseminarkan Pada Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh :

**ZURYATI
NPM: 1951010240**

Program Pendidikan : Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.Si
Pembimbing II : Anas Malik, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Desa Rajabasa sebelumnya termasuk ke dalam kategori desa miskin dan tertinggal. Alasan dilakukannya pemekaran adalah dikarenakan masih minimnya infrastruktur terutama akses jalan, fasilitas sosial, pendidikan dan tingginya jumlah keluarga prasejahtera, dan kurangnya dana dari pemerintah untuk keperluan desa sehingga hanya mengandalkan swadaya masyarakat yang semuanya tidak mampu secara ekonomi. Maka rumusan masalah penelitian ini yakni: bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa dan pandangannya dalam ekonomi islam. Tujuan penelitian: untuk mengetahui dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa dan pandangannya dalam ekonomi islam.

Dalam penelitian Ini Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Observasi, interviu dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu Teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sumber data Dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekdes, dan perwakilan Masyarakat Desa Rajabasa 1 Orang .

Hasil penelitian ini yakni: Pemekaran yang terjadi di Desa Rajabasa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. terlihat dari jumlah penduduk yang mendukung perputaran ekonomi, mendapatkan pendidikan 12 tahun wajib belajar, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, fasilitas untuk menunjang kesehatan, pendapatan yang stabil, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga yang seimbang, berjalannya ketenagakerjaan yang memperoleh pendapatan, perumahan yang layak serta lingkungan yang bersih. Sedangkan dalam pandangan ekonomi islam masyarakat Desa Rajabasa telah memenuhi kebutuhan lima dasar *maqashid as-syariah* dan juga telah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (primer) dan *hajiyyat* (sekunder), namun belum dapat memenuhi kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier).

Kata Kunci : Pemekaran Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Rajabasa village was previously included in the category of poor and underdeveloped villages. The reason for the expansion is due to the lack of infrastructure, especially road access, social facilities, education and the high number of underprivileged families, and the lack of funds from the government for village that it only relies on community self-subsistent all of which is not economically adequate. The research question is: how the impact of village expansion on the welfare of the rajabasa village community and its views in Islamic economics. The purpose of the study: to determine the impact of village expansion on the welfare of the people of rajabasa village and its views in Islamic economics.

In this research, the techniques used in collecting data are observation, interview and documentation. The data analysis used is qualitative descriptive analysis, that is analysis techniques including data reduction, data presentation, data verification and conclusion drawing. Furthermore the validity test of the data using source triangulation techniques and triangulation techniques. Data sources in this study consisted of the Village Head, Village Secretary, and 1 representative of the Rajabasa Village Community.

The results of this study are: The expansion that occurred in Rajabasa Village had a positive impact on the welfare of the community, it is proved the number of residents who support economic turnover, getting 12 years of compulsory education, fulfilling needs for clothing, food and shelter, supporting health facilities, stabiling income, equal household consumption and expenditure. Employment that generates income, decent housing and a clean environment. In the view of Islamic economics, the people of Rajabasa village have fulfilled the needs of the five basic maqashid as-syariah and have also been able to meet the needs of dharuriyyat (primary) and hajiyat (secondary), but it is not been able to meet the needs of tahsiniyyat (tertiary).

Keywords: *Village Expansion, Community Welfare, Islamic Economic Perspective.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuryati
NPM : 1951010240
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Maret 2024

Peneliti,



Zuryati

NPM.1951010240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Zuryati

NPM : 1951010240

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Di Munaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Skripsi Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Madnasir, S.E., M.Si

Andas Malik, M.E.Sy

NIP. 19750424 2002212 1 001

NIP. 19890506 201903 1 014

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 19820808201 1012009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” disusun oleh Zuryati, NPM: 1951010240, program studi Ekonomi Syari’ah Telah di Ujikan, dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : 07 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Asriani, S.H., M.H.

Sekretaris : Sherly Erika Sari, M.Si.

Penguji I : Mia Selvina, S.E., M.S.Ak.

Penguji II : Anas Malik, M.E.Sy.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A.
NIP. 19700926200811008

MOTTO

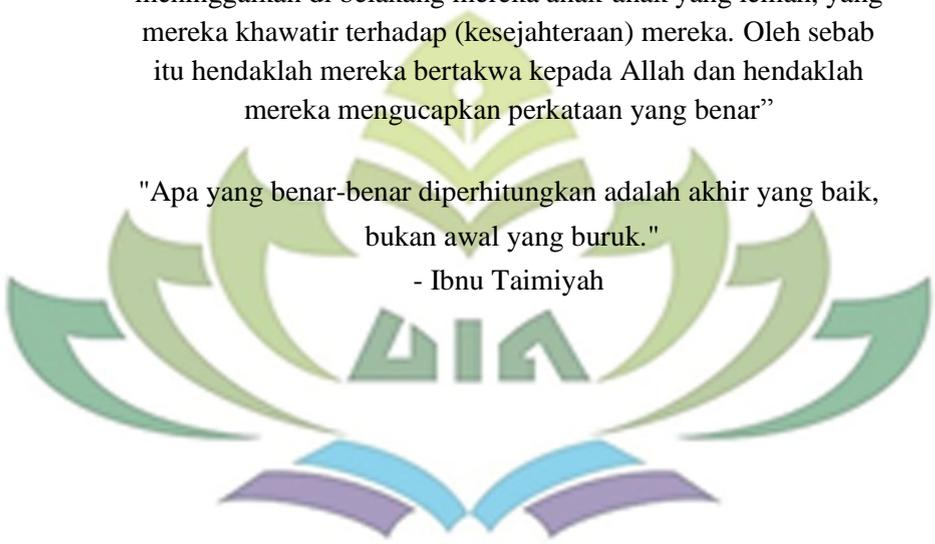
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠٠﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

"Apa yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir yang baik, bukan awal yang buruk."

- Ibnu Taimiyah



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil' Alamin*. dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada mereka yang telah berperan dalam proses pembuatan karya kecil ini yakni:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai Ayahanda Zuhdi dan Ibunda Rodyah dengan segenap jiwa raganya tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan limpahan do'a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadikan kalian termasuk ke dalam golongan yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW kelak Amiin.
2. Kedua kakak saya Desi Yuliza dan Pathul Khorib juga kedua adik saya Reno Aggresta dan Martin Firlando serta keponakan saya Devi Putri Utami yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menghibur, selalu menjadi inspirasi, mendukung dan selalu menghujani saya dengan do'a sehingga menjadi semangat yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
3. Kepada inisial LR dari program studi manajemen bisnis syari'ah terimakasih atas do'a, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan yang telah anda berikan.
4. Almamater tercinta yang memberikan banyak ilmu, pengetahuan Rabbani dan Islami serta pengalaman yang tak ternilai harganya, UIN Raden Intan Lampung semoga semakin melambung tinggi kejayaannya, berkualitas da berintegritas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Zuryati lahir di Tanjung Jati, pada tanggal 03 Agustus 2002, Anak ketiga dari lima bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Zuhdi dan Ibu Rodiyah. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Parda Suka kecamatan ngaras selesai pada tahun 2013.
2. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah Krui selesai pada tahun 2016.
3. MAN 1 Pesisir Barat dengan mengambil jurusan IPA selesai pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 Penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Islam dan Ikhsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Raja Basa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Strata satu (S1) di jurusan Ekonomi Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr Madnasir, M.S.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Anas Malik, M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang begitu berharga.

7. Segenap Aparatur Desa serta Masyarakat Desa Raja Basa yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan informasi-informasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,

Zuryati

NPM. 1951010240



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	14
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Penulisan	25

BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Landasan Teori	27
1. Desa	27
a. Pengertian Desa	27
b. Desa Menurut Para Ahli.....	27
c. Landasan Hukum Desa	28
d. Jenis-jenis desa	29
e. Karakteristik Desa.....	31
2. Pemekaran Desa.....	32

a.	Pengertian Pemekaran Desa	32
b.	Landasan Hukum Pemekaran Desa	33
c.	Konsep Pemekaran Desa	34
d.	Tujuan Pemekaran Desa	36
e.	Syarat-Syarat Pemekaran Desa	37
f.	Mekanisme Pemekaran Desa	39
g.	Indikator Pemekaran Desa	40
3.	Kesejahteraan	41
a.	Pengertian Kesejahteraan	41
b.	Kesejahteraan Menurut Para Ahli	42
c.	Landasan Hukum Kesejahteraan	43
d.	Teori Tingkat Kesejahteraan	43
e.	Indikator Kesejahteraan	44
4.	Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam	48
a.	Kesejahteraan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist	48
b.	Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		53
A.	Gambaran Dan Kondisi Umum Desa Rajabasa	53
B.	Temuan Lapangan	63
C.	Penyajian Fakta Dan Data Lapangan	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN		81
A.	Analisis Data Penelitian	81
B.	Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Rajabasa Dalam Pandangan Ekonomi Islam	92
C.	Temuan Lapangan	98
BAB V PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Rekomendasi	104
DAFTAR RUJUKAN		105
LAMPIRAN		111

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Raja Basa.....	9
2. Rata-rata Pendapatan Masyarakat Sebelum Pemekaran.....	9
3. Jumlah Penduduk Desa Rajabasa.....	58
4. Agama Penduduk Desa Rajabasa.....	59
5. Pendidikan Penduduk Desa Rajabasa	59
6. Profesi Penduduk Desa Rajabasa.....	60
7. Sarana Dan Prasarana Desa Rajabasa	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Pemerintahan Desa Rajabasa	54
2. Gambar Peta Rajabasa	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrumen Wawancara.....	111
2. Kerangka Observasi	115
3. Kerangka Dokumentasi	117
4. Dokumentasi Penelitian.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah kata kunci dari konsep penelitian yang akan dilakukan. Sebagai kerangka awal Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut mengenai judul ini, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Maka penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan dan menghindari salah penafsiran. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan kata yang terkandung dalam judul pada skripsi ini, agar supaya dengan adanya penegasan pada setiap kata diharapkan semuanya akan menjadi jelas, terarah, dan mudah dipahami. Adapun skripsi ini berjudul “ Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Untuk itu perlu diuraikan hal-hal seperti pengertian kalimat/istilah dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.¹

2. Dampak

Iyalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif, seperti halnya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.²

3. Pemekaran Desa

Pemekaran desa secara etimologi berasal dari kata dasar mekar yang artinya mulai berkembang, menjadi terbuka, dan mengurai.³ pemekaran desa adalah memecah/ memisahkan

¹ Sugiono, "Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung:Alfa Beta,2015)

² Kementerian PUPR, "kamus BPIW", (on-line) Tersedia di <http://bank.data.bpiw.pu.go.id>., Diakses 28 Februari 2024, Pukul 18.04.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kbbi, (Jakarta:Balai Pustaka,1991),Edisi Kedua,h.750

suatu kesatuan wilayah yang utuh menjadi beberapa bagian daerah baru baik provinsi, kabupaten, maupun desa dari daerah induknya sesuai undang-undang yang berlaku.

4. Kesejahteraan

Adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.⁴

5. Masyarakat

Adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu identitas bersama.⁵

6. Perspektif

Diambil dari bahasa Itali “prospettiva” yang berarti gambar pandangan. Perspektif juga dapat dikatakan sebagai cara pandang suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat sesuatu fenomena.⁶

7. Ekonomi Islam

Adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Abdul mun’in al-jamal dalam karyanya mengatakan bahwa ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur’an dan sunnah.⁷

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul tentang “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” ini adalah :

1. Secara Objektif

Diindonesia banyak ditemukan pemekaran desa dikarenakan pemekaran desa itu sendiri menjadi salah satu

⁴ Poerwadaminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

⁵ Prof. Dr. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

⁶ Elvinaro Ardianto Dan Bambang Q-Aness, Filsafat Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), h. 859

⁷ Ah Shibghatull Mujaddidi, “Ekonomi Islam Suatu Pengantar Data, Media Publishing, (2020), h. 15

upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik dan sosial politik yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tentunya pemekaran tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi di desa atau wilayah tersebut. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana keadaan Desa Rajabasa yang merupakan desa hasil dari pemekaran dari Desa Negeri Ratu, apakah dari pemekaran ini memberikan Dampak yang signifikan atau sebaliknya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2. Secara Subjektif

Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia dan mudah dipahami sehingga, meyakinkan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara maritim dengan letaknya yang strategis. Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dilihat dari perbedaan kondisi demografis, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia, juga potensi daerah, serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dengan hal ini pertumbuhan wilayah satu dengan wilayah lain tidak seimbang. Peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan daerah sering kali dapat mengakibatkan ketimpangan pembangunan di setiap daerah di Indonesia.

Pemerintah sering kali hanya memfokuskan pembangunan dan pelayanan publik yang berada di kota-kota besar, sehingga mengakibatkan munculnya ketidakmerataan bahkan ketimpangan pembangunan. Dengan demikian otomatis hal tersebut dapat memicu ketimpangan-ketimpangan lain yang terjadi antar kota dan desa seperti halnya kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan cita-cita bangsa dan tujuan dari terbentuknya negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah

hingga saat ini telah melakukan banyak kebijakan-kebijakan serta program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Negara Indonesia menjadi negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dengan karakteristik geografi yang terbagi-bagi dan berbeda-beda tiap pulauanya membuat Indonesia menjadi suatu negara yang memiliki jumlah suku dan bahasa yang paling beraneka ragam di dunia. Dan juga membuat sistem pemerintahan yang terpusat menjadi terasa kurang efektif dilihat dari pembangunan yang tidak merata di tiap-tiap daerah.

Sentralisasi menimbulkan berbagai permasalahan di daerah yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar. Sistem pembangunan yang terpusat menghasilkan kebijakan yang seragam dengan mengabaikan perbedaan dan variasi potensi daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan pada daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun tingkat kesejahteraannya ternyata masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan daerah lain.⁸

Pemekaran, pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus memastikan tercapainya akselerasi di berbagai bidang tersebut, yang pada giliran akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat.⁹ Akan tetapi perlu diketahui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan setelah pemekaran tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Sehingga pada kenyataan perkembangan selanjutnya banyak daerah hasil pemekaran belum atau kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan

⁸ Syafrizal, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi", (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 107

⁹ Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000

berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti sengketa batas wilayah, perebutan lokasi ibukota, dan konflik lainnya. Terutama dalam bidang pertumbuhan ekonomi yang belum membuahkan hasil terlihat dari kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi. Perlu dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pemekaran daerah seperti jumlah penduduk apakah telah sesuai dengan luas wilayah, Perkembangan penduduk yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama lahan yang ditempati akan menjadi sempit, atau sebaliknya. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan.¹⁰ Tetapi banyak juga daerah yang dapat menjalankan daerahnya dengan sangat baik. Banyak kasus pada suatu daerah yang memekarkan wilayahnya yang justru memiliki dampak yang positif bagi daerah induk.

Desentralisasi adalah jawaban dari permasalahan lokal bangsa Indonesia karena dilihat dari tujuannya yakni untuk agar supaya tiap-tiap daerah diharapkan dapat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik serta dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan bangsa, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terentaskannya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, politik demokratis, kesetaraan gender, kemajuan iptek, dan inovasi, keamanan (*security*), serta berkelanjutan lingkungan merupakan parameter-parameter penting pembangunan, yang makin menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia.¹¹

Pemekaran daerah atau yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, adalah pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah yang baru yang sesuai dengan ketentuan untuk melakukan pemekaran daerah seperti halnya pemecahan desa induk menjadi beberapa desa baru, yang diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan

¹⁰ Tri Ratnawati, *Pemerataan Daerah, Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.15-16

¹¹ Hasriani, "Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi, Kecamatan Manui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Haluoleo Kendari (2016), h.15

kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pasal 32 ayat (2) mengatur pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 32 ayat (3), bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.¹²

Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan berdaya guna demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah melakukan pemekaran wilayah dilatar belakangi oleh berbagai alasan, pertama, *preference for homogeneity* (kesamaan kelompok (SARA)) atau *historical ethnic* memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu wilayah yang sama pula. Kecenderungan pengelompokan etnik pada suatu wilayah seringkali tidak banyak kesempatan dalam hal ekonomi dan politik yang dapat dimanfaatkan, oleh sebab itu seiring semakin menguatnya hal tersebut akan menimbulkan keinginan untuk membentuk wilayah baru.

Kedua, *fiscal spoil* (intensif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai. Jaminan tersebut dialokasikan melalui pegawai negeri sipil maupun peluang penambahan jumlah staf pemerintah daerah. Dengan adanya dana alokasi tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya aktivitas perekonomian, memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum baik melalui belanja langsung pegawai maupun pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintahan.

¹² Nuraeni, Nasir, Asriani, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, (Juli-Desember 2019), h.33-34

Ketiga, *beaurocratic and political rent seeking* (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Kenapa politik, karena dengan adanya wilayah baru maka kekuasaan politik baru juga akan muncul, sehingga aspirasi politik masyarakat baik melalui kekuasaan eksekutif maupun legislatif akan lebih dekat.

Keempat, *administrative dispersion*, mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini diperkuat dengan beberapa alasan lainnya, dilihat dari daerah-daerah yang masuk kategori dapat melakukan pemekaran memiliki wilayah yang cukup luas, dan merupakan daerah dengan pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung yang masih sangat minim. Hal ini bisa menyebabkan pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.

Bappenas dan UNDP melakukan kerjasama untuk melakukan studi mengenai pemekaran daerah otonom baru sepanjang tahun 2000 hingga 2005. Melalui studi ini dapat dilihat secara umum menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya melakukan pemekaran daerah tidak lebih baik dibandingkan daerah induknya. hal tersebut didukung oleh beberapa aspek. Pertama ekonomi, disamping perannya masih lebih kecil pertumbuhan ekonomi daerah yang melakukan pemekaran masih relatif belum stabil dibandingkan wilayah lainnya. Kedua kemiskinan, meskipun masih terjadi tren penurunan akan tetapi jumlah kemiskinannya juga masih relatif tinggi, ketiga kesejahteraan, perbandingan yang diukur dengan PDRB per kapita tingkat kesejahteraannya masih tertinggal cukup jauh dibanding daerah induk.¹³

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain: Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa); Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; Batas wilayah Desa yang

¹³ Antonius Tarigan, "Dampak Pemekaran Desa, (Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 01, 2010), h.24-25

dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Provinsi Lampung secara administratif dibagi dalam 15 (lima belas) kabupaten/kota salah satunya yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat terletak di ujung paling barat wilayah Provinsi Lampung yang berhadapan dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang 210 kilometer dan dikelilingi lebatnya hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan membuat Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki bentang alam yang luar biasa. Pesisir Barat memiliki luas $\pm 2.889,88$ km² atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, dengan 116 Pekon/ Desa dan 2 Kelurahan. Pesisir barat dikenal memiliki destinasi wisatanya yang indah yakni wisata bahari dan wisata alam seperti pulau pisang (habitat lumba-lumba di sekitar pulau), beragam pantai (pantai labuhan jukung dan tanjung setia) yang menjadi tempat berselancar populer anugerah pesona indonesia sejak 2016, dan juga wisata beberapa goa, air terjun, dan peninggalan sejarah.¹⁵

Di Pesisir Barat tepatnya di Kecamatan Ngaras, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Rajabasa. Desa Rajabasa merupakan desa hasil pemekaran dari desa Negeri Ratu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, dan resmi menjadi desa definitif pada tahun 2017. Luas Desa Rajabasa adalah ± 23.89 km, terdiri dari 3 (Tiga) RW dan 3 (Tiga) RT dengan jumlah kepala keluarga (KK) yakni 287 KK.

¹⁴Perda Dalam Uu No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (16 Februari 2023), Pukul 11:28

¹⁵ Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat, "Profil Kabupaten Pesisir Barat"(On-Line), Tersedia Di <https://Pesisirbaratkab.Go.Id>, (16 Februari 2023), Pukul 02:53

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Rajabasa

Pemangku		
Rajabasa	Tanjung Jati	Talang Sebelas
354 Jiwa	494 Jiwa	671 Jiwa
Jumlah = 1.087 Jiwa		

Sumber: Data Profil Desa Rajabasa 2023

Keadaan Desa Rajabasa sebelum dilakukannya pemekaran merupakan salah satu bagian dari wilayah Desa Negeri Ratu, mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani /pekebun, buruh tani dan pekerja lepas yang bahkan memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah dari rata-rata UMR (Upah Minimum Regional).

Tabel 2
Rata-rata pendapatan masyarakat sebelum pemekaran

Pendapatan	
Harian	Bulanan
50.000-65.000	500.000-2.000.000

Sumber: wawancara peneliti kepada kepala desa Rajabasa

Potensi perekonomian di Desa Rajabasa sebagian besar adalah lahan pertanian yaitu sawah seluas ± 67 Ha dan lahan perkebunan 150 Ha terutama pisang seluas ± 18 Ha, jagung ± 11 Ha. keadaan sarana dan prasarana di desa Rajabasa awalnya juga kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan yang saat itu sebagian besar masih lebih panjang jalan makadam 12 km dan tanah 9,5 km dengan kondisi rusak.¹⁶ Selain itu rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pada saat itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat serta bantuan dari pemerintah.

Alasan masyarakat melakukan pemekaran Desa Rajabasa adalah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

¹⁶ Profil, "Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat", (Dokumen Desa:04 Februari 2023)

yang akan lebih maksimal jika di dukung dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Khususnya masyarakat dusun Talang Sebelas yang kesulitan naik turun melalui jalan tanah yang rusak, Sehingga solusi yang paling tepat adalah melakukan pemekaran desa, merujuk pada masyarakat yang akan semakin bertambah. Terlebih saat ini otonomi daerah memberikan ruang pada setiap wilayah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada. dengan adanya pemekaran desa tersebut maka pemerintah sama artinya menyejahterakan rakyatnya.

Dengan itu peneliti sebelumnya telah melakukan observasi awal terhadap kepala pekon Bapak Khohirin beliau mengatakan bahwa Desa Rajabasa sebelumnya merupakan desa yang masuk dalam kategori desa miskin dan tertinggal dikarenakan masih minimnya infrastruktur terutama akses jalan, terlebih salah satu dusunnya berada terbilang cukup jauh (terpencil) dari dusun lainnya. Minimnya fasilitas sosial dan pendidikan dan tingginya jumlah keluarga prasejahtera. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa saat itu kurangnya dana dari pemerintah untuk membiayai keperluan desa dan hanya mengandalkan swadaya masyarakat yang tidak semua mampu secara ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat mencetuskan ide untuk melakukan pemekaran dengan harapan mereka dapat sejahtera.¹⁷

Kesejahteraan diartikan sebagai perasaan hidup setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila ia telah mencapai titik kesenangan yang maksimal, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mampu ia gapai, memiliki jiwa yang sehat juga lahir dan batin terpelihara. Terlepas dari ancaman dan perasaan tersiksa yang disebabkan oleh kemiskinan. Kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia, oleh karena itu kemiskinan harus ditiadakan karena masih menggambarkan kondisi serba kurang

¹⁷ Khohorin, Kepala Pekon Desa Rajabasa, Wawancara Dengan Peneliti Di Balai Desa Pekon Rajabasa, (04 Februari 2023)

dalam pemenuhan ekonomi dengan kata lain ketidaksejahteraan.¹⁸

Di dalam islam segala sesuatunya sudah ada ketentuan tersendiri termasuk aturan ekonomi. Kesejahteraan dalam pandangan islam bukan semata-mata diukur dengan nilai *non-material*; seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial saja. Akan tetapi juga dapat dicapai dengan niat dan usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder baik di keluarga maupun dimasyarakat.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasi kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Salah satunya yaitu Allah SWT, berfirman dalam:

¹⁸ Yusuf Qhardawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta, 1995)

¹⁹ Rohman, Abdur, "Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Insyar' Ulum Al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)

Surah [Al-Nahl] Ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *"Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*

Kandungan dari ayat diatas yaitu, Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.²⁰

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rajabasa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat”**.

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas Maka Fokus Penelitian ini adalah tentang **“ Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”**.

²⁰ Salim Bahreisyndan Said Bahreisy, “Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV (Surabaya:Bina Ilmu,1988),h.595

2. Sub fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian Maka sub Fokus penelitian ini adalah :

1. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Kependudukan.
2. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Pendidikan.
3. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Kesehatan.
4. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Pendapatan.
5. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Konsumsi Dan Pengeluaran Rumah Tangga.
6. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Ketenagakerjaan.
7. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Indikator Perumahan Dan Lingkungan Hidup.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat?

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa?

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bermanfaat sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji otonomi daerah, pemekaran desa, dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai tambahan bahan kajian atau literatur dalam Ilmu Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai pemekaran desa dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi khazanah dalam proses penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum dilaksanakannya penelitian ini, telah ada beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang pemekaran desa dan kesejahteraan masyarakat, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudi Masniad, Kamaruddin, Silvy Amalia yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Desa Gapit Kecamatan Empang” Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa Gapit cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya perkembangan pembangunan sarana dan prasarana. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan dan sarana jalan serta pendapatan dari para informan yang meningkat setiap bulannya sehingga mampu meningkatkan perekonomian mereka jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai pemekaran wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun perbedaannya yakni tempat penelitian dan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian tersebut menggunakan aspek sosial dan ekonomi.²¹

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Titus Bernadus Tului yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa datah bilang baru dengan melihat beberapa aspek yaitu pendapatan perkapita, Kesehatan dan Pendidikan yang telah mengalami peningkatan setelah dilakukannya pemekaran wilayah. Akan tetapi terdapat kendala yang menyebabkan pemekaran tidak maksimal, seperti: sarana akses jalan, lapangan pekerjaan, kurangnya Tenaga pengajar dan tenaga medis dan sarana kesehatan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Yang menyamakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti kesejahteraan masyarakatnya setelah pemekaran wilayah, adapun yang membedakannya yakni

²¹ Rudi Masniat, Kamaruddin, Silvy Amalia, ” Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Desa Gapit Kecamatan Empang”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.7, No.1, April 2019.

tentu saja tempat penelitian dan juga metode yang digunakan untuk menganalisis.²²

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harianti, Arafat, Taslim Fait yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah berdampak positif dilihat dari setelah Pemekaran wilayah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat di Kecamatan Loea untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan sarana dan prasarana telah banyak dilakukan, mengoptimalkan kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan sembilan tahun dan kesehatan masyarakat. Yang menjadi persamaannya dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti kesejahteraan masyarakatnya setelah pemekaran wilayah serta kesamaan dalam metode penelitian yang diambil adapun perbedaannya yakni analisis yang digunakan untuk menganalisis data dan juga penelitian ini mengangkat perspektifnya dalam ekonomi islam sedangkan penelitian tersebut tidak.²³
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saiful, Alimuddin yang berjudul “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa nampar sepang ternyata belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Hal tersebut dapat dilihat dari potensi wilayah yang serba terbatas, juga keterlibatan Pemerintah yang masih minim untuk berpartisipasi dalam proses pemekaran wilayah tersebut. Meskipun Pemekaran Desa Nampar Sepang

²² Titus Bernadus Tului “Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu” Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2019, Vol.7, No.3

²³ Harianti, Arafat, Taslim Fait Yang Berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur” Journal Of Public Administration And Government, Oktober 2021, Vol.3, No.2

dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang secara geografis masih jauh dari jangkauan. Selain itu, upaya pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni sama-sama menganalisis tentang pemekaran desa, dengan beberapa perbedaan yakni penelitian ini menganalisis kesejahteraan masyarakat desa, dan mengusung perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian tersebut tidak.²⁴

5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wisudarini. S & Riyanto yang berjudul “Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran membuat APBD per kapita DOB meningkat lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan APDB per kapita daerah induknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan APBD per kapita tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita di DOB. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemekaran berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pemekaran daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tertinggal. Persamaannya yakni sama-sama menganalisis pengaruh pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya, adapun yang membedakannya ialah tempat, metode penelitian yang dipakai, serta penelitian tersebut bersifat luas, sedangkan penelitian ini hanya menganalisis satu desa saja.²⁵

Secara umum dari penelitian terdahulu di atas tentang pengaruh pemekaran desa, empat diantaranya berpendapat bahwa pemekaran desa berpengaruh terhadap masyarakat, dan satu lainnya menyatakan bahwa pemekaran desa belum

²⁴ Saiful, Alimuddin yang berjudul “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)”,(Siyasatuna:januari 2021), vol.2, no.1

²⁵ Wisudarini. S & Riyanto “Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (Ridwan Institute:20-09-2021), Vol 6, No.9

sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap masyarakat, serta satu diantara keenam penelitian sama sekali tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut membuat akan dilakukannya penelitian ulang terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan perspektif ekonomi islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁶ metode penelitian juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷

Adapun penelitian yang saat ini dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, penelitian tentang “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Analisis Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus dan paradigma yang berhubungan langsung dengan lapangan atau “*field research*”. Dimana penelitian ini disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).²⁸ penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian

²⁶ Iskandar, “Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Pertama, (Jakarta:Gaung Persada,2009), h.11

²⁷ Mohammad Ramdhan,”Metode Penelitian”,(Surabaya: Cipta Meda Nusantara,2021)

²⁸ Andi Prostowo,”Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media), h.21

lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Selain penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung literatur untuk mendapatkan informasi-informasi dan data secara relevan terhadap buku yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.³⁰ dari berbagai data baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang berkaitan Dengan “Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari penduduk dan perangkat Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat melalui wawancara/interviu, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan

²⁹ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", (Bandung:Manjar Maju, 1996), h.32

³⁰ Sarifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

dokumen-dokumen dari instansi terkait yang memiliki relevansi yang berkaitan mengenai topik penelitian.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tertarif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dengan gambaran data yang diperoleh.³² dalam pengumpulan data tentang dampak pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti harus mendapat data-data yang akurat, dan jelas. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara Atau Interview

Teknik wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data tatap muka atau secara langsung dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. yang menjadi narasumber untuk diwawancarai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kepala Desa, Sekdes (sekretaris desa), dan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu. Dibawah ini ada tiga macam pembagian interview yaitu:

- a. Interview tak terpimpin yaitu proses wawancara dimana penanya tidak sengaja mengarahkan pertanyaan pada pokok persoalan dari fokus penelitian dengan narasumber.
- b. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok permasalahan penelitian yang diteliti.
- c. Interview bebas Terpimpin adalah kombinasi antara interview terpimpin dan Tak Terpimpin. yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses

³¹ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cetakan Ke-24, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.456

³² Ahmad Tanzeh Dan Suyitno, "Dasar-Dasar Penelitian", (Surabaya:Elkaf, 2006), h.131

wawancara berlangsung mengikuti situasi. Dan alurnya, pewawancara harus pandai-pandai mengarahkan apa saja yang akan di wawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

Jenis interview yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber dikemukakan secara bebas, tetapi isi pertanyaan tetap sama seperti yang diajukan dan berpedoman pada ketetapan yang telah ditetapkan.³³ Adapun yang diinterview atau diwawancarai dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekdes, dan 1 orang Perwakilan Masyarakat di Desa Rajabasa.

b. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk melihat dan mengamati langsung keadaan di lapangan agar peneliti mendapatkan informasi sesuai gambaran yang lebih detail tentang permasalahan yang ditelitinya.³⁴ Sedangkan Menurut *Spradley*, tujuan observasi adalah memahami pola, norma, dan makna perilaku yang diamati. Selanjutnya *Spradley* mengemukakan apa yang akan diamati yakni:

- 1) Tempat adalah dimana Peneliti melakukan observasi misalnya, di rumah, lingkungan sekolah, di kelas dan lain sebagainya.
- 2) Pelaku adalah orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti seperti Kepala desa, Sekdes, dan masyarakat.
- 3) Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian seperti kegiatan, kegiatan kepala madrasah dan melakukan tugasnya sebagai supervisor, Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Metode observasi ada dua macam diantaranya:

³³ Sukandarrumidi, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h.94-96

³⁴ Khilmiah, "Metode Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Samodra Baru, 2016)

- 4) Observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan seseorang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber dalam penelitian dan Observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.³⁵

jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak tinggal ditempat penelitian, tetapi penulis sesekali datang ke tempat penelitian dan mencatat permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan tidak diperoleh melalui metode pokok untuk mendapatkan data sekunder guna mendukung data primer. Dengan metode ini, peneliti berharap agar mudah untuk memperoleh data yang akurat dengan pengamatan serta pencatatan terhadap suatu objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu fakta dan data yang telah terjadi dalam berbagai bahan. Dokumentasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.³⁶ dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data berbentuk dokumen dari balai pekon Desa Rajabasa yang berkaitan dengan penelitian.

5. Uji keabsahan (Triangulasi)

Triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014).h. 300

³⁶ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi,"Metode Penelitian", (Jakarta:Bumi Aksara,1997),h.85

diteliti agar dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran dan keaslian tingkat tinggi jika dilihat dari beberapa sudut pandang. jika peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi maka peneliti mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data tersebut, dengan cara mengecek kredibilitas data menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.³⁷

Dalam pengujian triangulasi ada 3 macam kredibilitas yaitu:

a. Triangulasi sumber

Yaitu dengan menguji kredibilitas data yang dilakukan dan dengan mengecek data yang diperoleh dengan berbagai sumber.

b. Triangulasi teknik

menguji kredibilitas pada data yang dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga salah satu hal yang sangat mempengaruhi kredibilitas data, maka dari itu dalam menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, Observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.³⁸ Tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari satu sumber dengan sumber yang lain. dan mencari kebenaran dan keakuratan data dan informasi yang di peroleh dari berbagai sumber.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang terpenting dan penentu dalam sebuah penelitian, Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan kemudian di olah dan dianalisis dengan saksama sehingga menyimpulkan lembaran-lembaran yang akan digunakan untuk menjawab

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.h. 227

³⁸Sugiono.

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif jadi data yang diperoleh adalah data kualitatif. Langkah-langkah dalam memperoleh data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data atau proses transformasi merupakan proses penelitian, pemusatan, perhatian, transformasi data yang mencatat hasil dari lapangan mencakup seluruh hasil pengumpulan data penelitian selengkap mungkin dan memilih untuk dijadikan suatu konsep, kategori, atau tema-tema tertentu.³⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberi kode pada aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif terdapat teks yang bersifat Naratif. Dengan penyajian seperti itu diharapkan seluruh informasi yang diperoleh dapat tertata dengan baik dan benar agar menjadi bentuk padat dan mudah dipahami oleh semua orang untuk menarik sebuah kesimpulan.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dan Penarikan kesimpulan yaitu bagian ketiga dari kegiatan analisis data. “kegiatan ini dilakukan terutama dimaksud untuk memberi makna dari hasil Analisis menjelaskan pola-pola urutan, penjelasan hubungan diantara dimensi-dimensi yang telah

³⁹Tobrani Imam Suprayogi, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).h.193

diuraikan”. Jadi walaupun data telah disajikan atau disusun dalam bahasa yang mudah dipahami, bukan berarti analisis data telah berakhir melainkan masih harus ditarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan yang singkat sebagai sebuah temuan penelitian yang mendasar pada data yang telah terkumpulkan supaya data mudah dipahami maknanya.⁴⁰

J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab satu ini terdapat Penegasan judul, alasan memilih judul latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Di dalam bab dua ini berisikan landasan teori yang menjabarkan tentang teori-teori terkait yang digunakan peneliti dalam skripsi ini.

BAB III (DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN)

Bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang pertama gambaran umum objek penelitian dimana dalam gambaran umum objek penelitian tersebut berisi terkait objek penelitian skripsi ini seperti: sejarah objek penelitian, struktur organisasi pemerintahan, visi dan misi objek penelitian, kondisi geografis dan kondisi penduduk objek penelitian. Kedua yaitu penyajian fakta dan data penelitian yang mana isinya terkait data-data primer dan sekunder yang diambil dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi.

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).h.103

BAB IV (ANALISIS PENELITIAN)

Bab empat yaitu bab isi atau hasil analisis penelitian dari data yang telah di cantumkan dalam bab tiga dan menjawab rumusan masalah yang ada di bab satu.

BAB V (PENUTUP)

Bab kelima yaitu bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari hasil penelitian analisis penelitian. Rekomendasi mengenai saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Desa

a. Pengertian Desa

Di Indonesia seperti yang kita ketahui banyak sekali daerah yang di namakan desa, Dalam bahasa Sansekerta desa berasal dari dhesi yang berarti “tanah kelahiran” dalam pengertian ini desa merupakan suatu pemukiman yang terdapat kehidupan masyarakat yang identik dikenal dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya.⁴¹ Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah desa diperkirakan akan selalu bertambah dari tahun Ketahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), oleh karenanya Desa-desa baru masih akan terus bertambah selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya.

b. Desa Menurut Para Ahli

Para ahli kependudukan memiliki pendapat masing-masing mengenai desa sebagai berikut;

- 1) Menurut R. Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

⁴¹ Haw. Widjaja, "Otonomi Desa", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.41

- 2) Sedangkan menurut P.J. Bournen, desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama di suatu daerah sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, namun di desa kebanyakan masyarakatnya hidup dengan mata pencaharian dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Di desa kerukunan penduduk lebih terasa dari pada di kota sifat tolong menolong di desa masih terjalin dan saling mengenal seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut.
- 3) Menurut Kuntjaningrat ia mendefinisikan desa sebagai sekumpulan masyarakat kecil yang tinggal menetap di suatu daerah yang jauh dari perkotaan, sedangkan dalam pendapat Bargel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. sedangkan Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek, yaitu:
 - a) analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500.
 - b) analisis sosial sikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal di antara sesama warganya.
 - c) analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

c. Landasan Hukum Desa

Pemekaran desa sangat memudahkan bertambahnya desa-desa baru yang mana sebagian besar masyarakat meyakini dengan adanya pemekaran desa maka daerahnya akan semakin berkembang oleh karenanya masyarakat berlomba-lomba untuk menjadikan desanya

sebagai desa yang mandiri dengan berbagai alasan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa,⁴² yang mana disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Jenis-jenis Desa

Berdasarkan perkembangannya, desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.⁴³

1) Desa Tradisional

Desa Tradisional atau pra-desa adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung dengan alam mulai dari cara bercocok tanam, pemeliharaan kesehatan, pengobatan dan pengolahan makanan. Biasanya pola seperti ini terjadi pada desa dengan wilayah yang terpencil dan jauh dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga warganya lebih tertutup. Pola hubungan antar warganya sangat erat dan desa itu belum memiliki berbagai sarana yang memadai untuk mendukung mobilitas sosial.

2) Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti penduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih

⁴² T.Fakhrial Dani, Edi Suhaimi, T. Angga Maulana, "Analisis Implementasi Lokasi Dana Desa Pada Kota Lhoseumawe", Tahun 2015, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, h.50-51

⁴³ Muhamad, (2019, November 22), Artikel Diakses Di <https://www.Berdesa.com>. /Apa-Beda-Desa-Swadaya-Swakarsa-Dan-Swasembada.

sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dan oleh karena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih terbelakang.

3) Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak terisolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tidak lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

4) Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang sudah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Karakteristik Desa

Karakteristik desa merupakan pembeda desa satu dengan lainnya. Karakter desa tersebut dapat ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan. desa tentu memiliki perbedaan, Perbedaan desa di Indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing. Dimana Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum juga dalam realitasnya ada perbedaan-perbedaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dalam karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep desa secara khusus (desa-desa di Indonesia). Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang di pilih atau ditentukan oleh ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten dan kota-kota lainnya.

Karakteristik pedesaan dalam beberapa teori dibedakan antara masyarakat yang ada di kota dan yang ada di desa berdasarkan letak geografis kebiasaan dan karakteristik keduanya. masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat peranan kelompok primer sangat besar.
- 2) Keadaan geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat.
- 3) Hubungan lebih bersifat homogen.
- 4) Struktur masyarakat bersifat homogen.
- 5) Tingkat mobilitas sosial rendah.
- 6) Keluarga lebih di tekan kan pada fungsi sebagai unit ekonomi.
- 7) Proporsi jumlah anak cukup besar.⁴⁴

Faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik kota dan desa yaitu: mata pencaharian, ukuran komoditas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, usaha nelayan, ternak kerajinan tangan dan pedagang kecil. Ciri lain yang di tekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri.⁴⁵

2. Pemekaran Desa

a. Pengertian Pemekaran Desa

Indonesia merupakan negara yang luas sehingga pemerintah pusat kesulitan menjangkau daerah-daerah yang ada di indonesia terutama daerah terpencil untuk pemerataan pembangunan oleh karenanya dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah pemekaran. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar, berarti Berkembang menjadi terbuka, Menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas,

⁴⁴ Nurman, "Strategi Pembangunan Daerah", (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada,2015), h.228

⁴⁵ Ibid, Strategi, H.-----

besar, ramai, bagus, Mulai timbul dan berkembang.⁴⁶ Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian berdiri sendiri. Jadi dengan demikian Desa pemekaran adalah suatu dusun yang sebelumnya suatu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pemekaran Desa adalah pemecahan/pemisahan diri dari daerah induknya, kemudian membentuk daerah baru baik itu Provinsi, Kabupaten maupun Desa dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran Desa bukan hanya pemisahan dari satu desa menjadi dua atau lebih desa namun pemekaran dapat berupa penggabungan dari dua desa atau lebih menjadi satu desa. akan tetapi di Indonesia lebih banyak terjadi pemecahan satu desa menjadi dua atau lebih daripada penggabungan desa.

b. Landasan Hukum Pemekaran Desa

Undang-undang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi upaya pemekaran wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa. Undang-undang merupakan instrumen politik hukum pemerintah dalam melakukan pembangunan, bahkan perkembangan wilayah suatu negara lebih meyakinkan berjalan semestinya.⁴⁷ Ada banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang pemekaran wilayah. Dibawah ini UU tentang Pemekaran Desa yaitu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilakukan dengan

⁴⁶ Purwardarminto, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.132

⁴⁷ Dede Mariana Dan Carolina Paskarina, "Demokrasi Dan Politik Desentralisasi", (Malang: Graha Ilmu, 1999), h.23

mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola dan daya saing desa.⁴⁸

c. Konsep Pemekaran Desa

Konsep pemekaran desa menurut Djohan ada 3 (tiga) dimensi dalam pemekaran yaitu sebagai berikut:

1) Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara pusat dengan daerah. Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisasi sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai etnis politik, bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Dan dimensi politik memiliki beberapa faktor:

a) Faktor Geografis

Faktor geografis ialah faktor yang mengasumsikan kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Geografis menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom.

⁴⁸ Pemendagri 2017 PP Dalam Negeri, No.1, Tahun 2017. Penataan Desa Diakses Pada (05 Agustus 2023)

b) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dalam mengasumsikan jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membedakan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politik dalam ikatan kesatuan masyarakat akan lebih kuat. Faktor ini langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

c) Faktor Demografis

Faktor demografis, ialah faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasi dengan kesatuan secara geografis, maka dalam politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom.

d) Faktor Sejarah

Faktor yang terakhir atau keempat ini ialah faktor sejarah dalam faktor ini mengasumsikan bahwa yang struktur pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi daerah otonom.

2) Dimensi Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau didesentralisasikan akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena dalam desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. Dari sudut pandang administrasi pemberian desentralisasi selain menyangkut

tentang teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif.

3) Dimensi Kesenjangan Wilayah

Kasus dalam Penyelenggaraan pemerintahan nasional yang hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidak seimbangan perkembangan antar daerah. Ada desa yang sangat maju, tetapi sebaliknya ada juga daerah yang relatif tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat persoalan pembentukan suatu daerah yang otonom. Daerah yang otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya yang akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan yang selanjutnya untuk menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat bebas dalam mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri.⁴⁹

d. Tujuan Pemekaran Desa

Pemekaran dilakukan bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab penumpukan pembangunan pada satu kawasan jelas tidak adil. Maka untuk segera mewujudkan keadilan itu satu-satunya jalan adalah dengan pemekaran wilayah.

Sedangkan tujuan khusus pemekaran wilayah antara lain. pertama, untuk segera pemeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana. Kedua, agar masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibukota kabupaten yang selama ini belum merasakan nikmatnya potensi kekayaan alam, bisa segera merasakan. Ketiga, untuk mempercepat partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui azas pemberdayaan. Keempat, agar

⁴⁹ Djohan Djohermansyah, "Problematika Pemerintahan Dan Politik Lokal", (Jakarta: Bumi Aksa, 1990), h.120-130

jarak jangkauan rentang kendali pemerintahan menjadi pendek. Kelima, agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang baru dimekarkan memiliki keberanian untuk mengembangkan diri berdasarkan kemampuan sendiri di segala bidang.⁵⁰ Pemekaran wilayah atau daerah otonom diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang lebih mumpuni.

e. Syarat-syarat Pemekaran Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang syarat-syarat pemekaran desa yaitu:

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk, yaitu:
 - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

⁵⁰ Edi Sutiyawan, "Dampak Pemekaran Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pesisir Utara, Ejournal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (UNMUL)", (Kalimantan Timur: 2013)

- f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara,
 - g) Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - h) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - i) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - j) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
 - 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.⁵¹

⁵¹ Ibid, pemendagri 2017, h 20

f. Mekanisme Pemekaran Desa

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.⁵² (UU Desa) tidak disebutkan mengenai dusun. Namun ada peraturan perundang-undangan yang dahulu memberikan definisi atas Desa, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa⁵³ (UU pemerintah) Desa pasal 1 huruf C UU pemerintah desa memberikan Alur Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa sebagai berikut :

- 1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa oleh masyarakat
- 2) Mengajukan usul pemekaran Desa kepada BPD dan kepala Desa melibatkan Masyarakat.
- 3) Mengadakan rapat bersama kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan Desa melibatkan BPD dan kepala Desa.
- 4) Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk melibatkan kepala Desa.
- 5) Melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
- 6) Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau sebutan lain), dan unsur masyarakat Desa.
- 7) Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa paling

⁵² Ibid, UU, h.-----

⁵³ Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

- lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan pimpinan DPRD;
- 8) Penetapan Rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
 - 9) Mengundangkan peraturan daerah di dalam lembaran daerah jika Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa dianggap sah dengan melibatkan Sekretaris daerah.

g. Indikator Pemekaran Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Cara Penilaian Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. Indikator yang menjadi penilaian sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kemampuan Ekonomi yaitu merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi, kabupaten/kota yang dapat diukur dari;
 - a) Produk domestik regional bruto (PDRB)
 - b) Penerimaan daerah sendiri.
- 2) Potensi Daerah yaitu merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari;
 - a) Lembaga keuangan
 - b) Saran ekonomi
 - c) Sarana pendidikan
 - d) Sarana kesehatan
 - e) Sarana transportasi dan komunikasi
 - f) Sarana pariwisata
 - g) Ketenagakerjaan.
- 3) Social Budaya yaitu merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur social dan pola budaya

⁵⁴ PP Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Pasal 3-10.

masyarakat, kondisi social budaya masyarakat yang dapat diukur dari;

- a) Tempat peribadatan
 - b) Tempat/kegiatan institusi social dan budaya
 - c) Sarana olahraga.
- 4) Sosial Politik yaitu merupakan cerminan kondisi social politik masyarakat yang dapat diukur dari;
 - a) Partisipasi masyarakat dalam berpolitik
 - b) Organisasi kemasyarakatan.
 - 5) Jumlah Penduduk yaitu merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
 - 6) Luas Daerah yaitu merupakan luas tertentu suatu daerah.
 - 7) Pertimbangan lain yaitu merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya Otonomi Daerah yang dapat diukur dari;
 - a) Keamanan dan ketertiban
 - b) Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
 - c) Rentang kendali
 - d) Propinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan atau Kota
 - e) Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan
 - f) Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan.

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Setiap individu tentu menginginkan kesejahteraan, kesejahteraan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, sejahtera juga dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang

terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁵⁵

Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih, pendidikan dan pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin.⁵⁶

b. Kesejahteraan Menurut Para Ahli

Para ahli memberikan pemikiran yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan, berikut beberapa pendapat tentang kesejahteraan menurut para ahli:

Pertama, menurut Garda Maheswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.⁵⁷

Kedua, Kesejahteraan menurut Hatta, adalah peran hidup seseorang yang sederajat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa tercukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam batasan hidupnya. Ia merasa jiwanya tentram baik itu lahir maupun batin dan merasa adanya keadilan dalam hidupnya, terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam dan menyiksa.⁵⁸

⁵⁵ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.3, No.2, Desember 2015, h.384

⁵⁶ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara", Jurnal Geografi, Vol.9, No.1, (2017), h.53

⁵⁷ Ellyana Kusumawardhani, (2014), "Pelaksanaan PNPB Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol.2, No.1, H.27-28.

⁵⁸ Anwar Abbas, (2010), "Bung Hatta Dan Ekonomi Islam", (Jakarta:Kompas, h.161

Ketiga, sedangkan Menurut *David Mc Celland*, kesejahteraan didapatkan ketika seseorang mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang mempunyai tanggung jawab atas masa depannya terhadap kesejahteraannya. Hal ini akan terjadi ketika seseorang itu bisa menjadi pesaing yang baik dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di dalam diri sendiri.⁵⁹

c. Landasan Hukum Kesejahteraan

Dapat dikatakan sejahtera apabila kondisi kebutuhan telah terpenuhi termasuk kebutuhan sosialnya, sesuai undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.⁶⁰ yang mana penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

d. Teori Tingkat Kesejahteraan

Teori yang paling banyak digunakan dalam menilai kesejahteraan adalah *Pareto Criteria* yang di kemukakan oleh ekonom berkebangsaan Italia bernama *Vilfredo Pareto*. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (*eg. Intervention*) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

Hal yang perlu di perhatikan dalam pareto kriteria adalah pareto *improvement* dan pareto *efficient*. Kedua hal tersebut akan mempengaruhi keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pareto *improvement* ialah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak

⁵⁹ Luthfi J.Kurniawan, Dkk (2015), “Negara Kesejahteraan”,(Yogyakarta:Andi Offset, h.1

⁶⁰ Undang-Undang No.11 Tahun2009, Tentang Kesejahteraan Sosial

yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*. Pareto *efficient* ialah sebuah kondisi dimana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (*bettering off*) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*).

Dalam teori ekonomi mikro ada yang di kenal dengan teori pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu:

1) Pareto Optimal

Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.

2) Pareto non-optimal

Dalam tingkatan pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain.

3) Pareto Superior

Dalam tingkatan pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain.

Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat di lakukan.⁶¹

e. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat dikatakan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapatan maka semakin kecil pula tingkat kesejahteraannya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan menurut

⁶¹ Sukidin, Basrowi, "Perencanaan Dan Strategi Pembangunan, (2017), h. 66

Badan Pusat Statistik (BPS) lebih spesifiknya sebagai berikut:⁶²

1) Kependudukan

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kependudukan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a) Kepadatan penduduk, jumlah penduduk apakah mampu menopang perekonomian.
- b) Rasio jenis kelamin, terdapat ketimpangan atau tidak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari jumlah dan pendidikannya.
- c) Kualitas penduduk, dilihat dari lama pendidikan yang ditempuh.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak dari setiap penduduk untuk dapat membangun potensinya melalui siklus pembelajaran. Setiap penduduk Indonesia memiliki pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki tanpa melihat posisi masyarakat (status sosial), status keuangan, identitas, agama dan area geografis. Pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a) Pendidikan yang ditamatkan, seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan.
- b) Angka melek huruf, masyarakat usia sekolah sampai 60 tahun sudah bisa membaca.
- c) Angka putus sekolah, anak-anak usia sekolah sudah mendapatkan pendidikan 12 tahun wajib belajar. Semakin rendah angka putus sekolah

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, (2017),” Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mukomuko 2018”, h.Xii-Xviii

maka akan semakin sejahtera keadaan suatu daerah.

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator pencapaian kemajuan pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit mempertahankan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Sehingga pembangunan dan upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat mencapai semua tingkat masyarakat dan tidak membedakan dalam penerapannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan kesehatan dan mampu atau tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan.

Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan meliputi:

- a) Sandang, pangan, dan Papan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum makan protein dalam jangka waktu 1 minggu, pakaian, dan rumah yang layak untuk ditinggali.
 - b) Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, menyertakan masyarakat yang sakit sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan.
 - c) pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan di rumah.⁶³
- ### 4) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang disebut pendapatan adalah semua penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu.

⁶³ Badan Pusat Statistik (On-Line), Tersedia Di <http://www.bps.go.id/> (25 Januari 2023).

- a) Perbedaan tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Baik berupa gaji dari pekerjaan, gaji dari properti, dan pinjaman dari otoritas publik.
 - b) Masyarakat usia kerja telah memperoleh penghasilan.
- 5) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga
- Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga yang betul-betul dikonsumsi (dimakan/dipakai) atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik pembelian/produksi maupun pemberian/pembagian. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- a) Keseimbangan antara pengeluaran pangan (makanan) dan non pangan (biaya perumahan dan fasilitas rumah tangga).
 - b) Tingkat konsumsi bergantung pada tingkat pendapatan, semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak nominal belanja yang dikeluarkan rumah tangga contoh kecil mampu membeli makanan berprotein tinggi seperti (daging, ikan, dan telur).
- 6) Ketenagakerjaan
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Ketenagakerjaan adalah:
- a) jumlah seluruh penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang mampu memperoleh penghasilan atau dapat memproduksi barang dan jasa.

- b) jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- 7) Perumahan dan lingkungan hidup
- Perumahan dan lingkungan hidup adalah kebutuhan manusia yang memiliki peranan penting dalam tugasnya sebagai tempat berlindung bagi setiap keluarga dan untuk meningkatkan kualitas orang di masa depan. Demikian juga, rumah merupakan penentu kesejahteraan masyarakat, di mana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu mendukung keadaan kesehatan setiap penduduknya.
- a) Rumah yang nyaman mempunyai lantai, atap, dan dinding yang kokoh, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
 - b) Dan lingkungan hidup yang sehat baik di rumah sendiri maupun permukiman sekitar, (pekarangan rumah, selokan, dan sungai).

4. Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam

a. Kesejahteraan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist

Islam merupakan Agama yang sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Oleh sebab itu islam hadir sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan yang hakiki.

Berikut Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan. Terdapat dalam Al-Qur'an surat [An-Nisa] ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٤﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*⁶⁴

Sebagaimana ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa representasi dari kemiskinan berasal dari kekhawatiran terhadap komunitas yang lemah, yang mana hal tersebut merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, seperti halnya sabda Rasulullah Saw. Dalam hadits Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَيْتَقَنَهُ

Artinya: *“sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)”*

Pada ayat hadits di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi

⁶⁴ Mohamad Taufiq,(2013),”Al-Qur;An Dan Terjemahannya, Add-Ins Quran In Microsoft Word, Version 2.2.0.0, Diakses (04 Juni 2023)

penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertakwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketakwaannya kepada Allah Swt.⁶⁵

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Dalam islam ada istilah Masalah yang artinya segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Karenanya Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Al-Syathibi yaitu:⁶⁶

1) Al-Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyat ini dalam buku fiqih termasuk As-Syathibi, membagi menjadi lima hal

⁶⁵ Ibid, Konsep Kesejahteraan....., h.391-392

⁶⁶ Muslimin Kara," Pemikiran As-Syathibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", Vol.2, No.2, 2015.

yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Kelima al-dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia, karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima al-dharuriyyat. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

2) Al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyyat. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3) Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier/Pelengkap)

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak juga tidak akan menimbulkan

kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengaruh pemekaran desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat dalam perspektif ekonomi islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pemaparan mengenai pemekaran Desa Rajabasa dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa ini telah membuat perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat di Desa Rajabasa menjadi lebih baik dengan memberikan apa yang dibutuhkan sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, Pemekaran yang terjadi di Desa Rajabasa telah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa dilihat dari terpenuhinya 7 (tujuh) indikator kesejahteraan yang mana hasilnya sangat mencerminkan kondisi kesejahteraan Desa Rajabasa. Seperti jumlah penduduk yang mendukung kemaksimalan jalanya perekonomian. Mendapatkan pendidikan 12 tahun wajib belajar. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, juga fasilitas untuk menunjang kesehatan. Pendapatan/penghasilan yang stabil. Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga yang baik dan seimbang. Berjalannya ketenagakerjaan yang memperoleh pendapatan. Perumahan yang layak serta lingkungan yang bersih. dengan ini hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Desa Rajabasa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
2. Pandangan ekonomi islam mengenai dampak pemekaran Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Rajabasa, yaitu pemekaran desa telah menciptakan dampak kesejahteraan masyarakat sehingga terpenuhinya kebutuhan lima dasar *maqashid as-syariah* di Desa Rajabasa yaitu agama (*al-dien*), harta (*maal*), akal (*aql*), hidup atau jiwa

(*nafs*), dan keturunan (*nasl*). Dan masyarakat juga telah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) dan *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), namun belum dapat memenuhi kebutuhan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dengan demikian kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam iyalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi, dunia dan akhirat.

B. Rekomendasi

Demi ke depannya diharapkan untuk menjadi lebih baik, peneliti ingin memberikan beberapa rekomendasi kepada:

1. Sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa telah memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, tentu peneliti ingin memberi saran agar supaya hal ini dipertahankan demi kesejahteraan masyarakat semakin lebih baik lagi.
2. Untuk para aparatur Desa dan pemerintah setempat diharapkan agar selalu mempertahankan kerja samanya untuk kelancaran evaluasi perkembangan Desa Rajabasa demi pembangunan kesejahteraan semakin membaik lagi.
3. Untuk masyarakat Desa Rajabasa diharapkan agar menerima keputusan pemekaran daerah karena berdampak positif dan memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan yang disediakan pemerintah.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau literasi yang berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ah Shibghatullah Mujaddidi, *“Ekonomi Islam Suatu Pengantar Data”*, (Media Publishing, 2020), h.15.
- Ahmad Tanzeh, Dan Suyitno, *“Dasar-Dasar Penelitian”*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h.131
- Alkat Ali, *“Wawancara Dengan Sekretaris Desa Rajabasa”*, Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 10.34 WIB.
- Amirus Sodik, *“Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, Desember 2015, h.384
- Andi Prastowo, *“Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h.21.
- Antonius Tarigan, *“Dampak Pemekaran Desa Majalah Perencanaan Pembangunan”*, Edisi 01, (2010), h.24-25
- Anwar Abbas, *“Bung Hatta Dan Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Kompas, 2010) h.161
- Badan Pusat Statistik (On-Line), Tersedia Di <http://www.bps.go.id/> (25 Januari 2023).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, (2017), *“Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mukomuko 2018”*, h.xii-xviii.
- Cholid Narbuko, Dan Abu Achmadi, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h.85
- Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Darrusalaam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68.
- Data Balai Desa, *Visi Dan Misi Desa Rajabasa*, Dokumen Balai Desa Pekon Rajabasa.2023.
- Data Profil Desa Rajabasa, 2023.
- Dede Mariana, Dan Carolina Pasarina, *“Demokrasi Dan Politik Desentralisasi”*, (Malang: Graha Ilmu, 1999) h.23

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Edisi Kedua, h.750.
- Djohan Djohermansyah, *"Problematika Pemerintahan Dan Politik Lokal"* (Jakarta: Bumi Aksa, 1990) h.120-130
- Edi Setiyawan, *"Dampak Pemekaran Di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pesisir Utara"*, Ejournal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul). (Kalimantan Timur:2013).
- Ellyana Kusumawardhani, (2014), *"Pelaksanaan PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Pati"*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikipveteran Semarang, Vol.2, No.1, h.27-28
- Elvinaro Ardianto, Dan Bambang Q-Aness, *" Filsafat Ilmu Komunikasi"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2007), h.859.
- Harianti, Arafat, Taslim Fait Yang Berjudul *"Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur"* *Journal Of Public Administration And Government*, Oktober 2021, Vol.3, No.2
- Hasriani, *"Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagafi Kecamatan Madui Kepulauan Kabupaten Morowali, Universitas Haluoleo Kendari*, (2016), h.15
- Haw. Widjaja, *"Otonomi Desa"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.41
- Iskandar, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h.11.
- Kartini, Kartono, *"Pengantar Metodologi Riset Social"*, (Bandung: Manjar Maju, 1996), h.32.

- Kementerian PUPR, "Kamus BPIW", (Online) Tersedia Di [Http://Bank.Data.Bpiw.Pu.Go.Id](http://Bank.Data.Bpiw.Pu.Go.Id). Diakses 28 Februari 2024. Pukul 18.04
- Khilmiah, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Samudra Baru, 2016)
- Khohirin, "*Wawancara Dengan Kepala Desa Rajabasa*", Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 09.26 WIB.
- Khohirin, Kepala Pekon Desa Rajabasa "*Wawancara Dengan Peneliti Di Balai Desa Pekon Rajabasa*" (04 Februari 2023)
- Lexy J.Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung:Remaja Rosdakarya,1999). h.103
- Luthfi, J.Kurniawan, Dkk (2015), "*Negara Kesejahteraan*", (Yogyakarta: Andi Offset), h.1
- Muhamad Taufik, (2013), "*Alquran Dan Terjemahannya Add- Ins Quran In Microsoft Word*", Version 2.2.0.0. Diakses 04 Juni 2023.
- Muhamad, (2019, November 22) Artikel Diakses di [Http://Www.Berdesa.Com](http://www.Berdesa.Com), /Apa Beda-Desa-Swadaya-Swakarsa -Dan-Swasembada.
- Muhammad Ramdhan, "*Metode Penelitian*", (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Muslimin Kara, "*Pemikiran As-Syathibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*", Vol. 2, No. 2, 2015.
- Nita Wati, "*Wawancara Dengan Perwakilan Rakyat Desa Rajabasa*", Tanggal 1 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB.
- Nuraini, Nasir, Asriani, "*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, (Juli Desember 2019)
- Nurman, "*Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015) h.228

- Pemendagri. Pemendagri 2017 PP Dalam Negeri, No.1, Tahun 2017. Penataan Desa Diakses Pada (05 Agustus 2023)
- Poerwadaminta Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Portal Resmi Kabupaten Pesisir Barat, "*Profil Kabupaten Pesisir Barat*", (On-line) Tersedia di <https://Pesisirbaratkab.Go.Id>, diakses 16 Februari 2023, Pukul 02.53
- PP Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, pasal 3-10. Diakses 05 Agustus 2023, Pukul 22.17
- Prof Dr Koentjaraningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Profil Desa Rajabasa Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, "*Dokumen Desa*", (04 Februari 2023)
- Purwadarminto, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.132
- Ridwan Jamal, "*Maqashid Al-Syari'ah Dan Reverensinya Dalam Konteks Kerohanian*":*Junal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1 (2017).8-9.
- Rohman Abdur, "*Ekonomi Al Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum Al-Din*", (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)
- Rosni, "*Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara*" , *Jurnal Geografi*, Vol.9, No.1 (2017) h.53
- Rudi Masniat, Kamaruddin, Silvy Amalia, " *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Desa Gapit Kecamatan Empang*", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.7, No.1, April 2019.
- Saiful, Alimuddin "*Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)*",(Siyasatuna:januari 2021), vol.2, no.1

- Salim Bahreisy Dan Sait Bahreisy, " *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II*", (Surabaya: Bina Ilmu,1988).Hal 314-315.
- Salim Bahreisy, Dan Said Bahreisy, "*Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid Iv*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.595
- Sarifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h.7.
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kombinasi*", (Bandung: Alfa Beta, 2015).
- Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cetakan Ke-24*", (Bandung: Alfabeta, 2018) h.456
- Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung:Alfabeta,2014). h.300
- Sukandarrumidi, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2012), h.94-96
- Sukidin Basrowi, "*Perencanaan Dan Strategi Pembangunan*", (2017), h.66
- Syafrizal, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*", (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.107
- T. Fakrial Dani, Edi Suhaimi, T. Angga Maulana "*Analisis Implementasi Lokasi Dana Desa Pada Kota Lhoseumawe: Tahun 2015*". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, h. 50-51
- Titus Bernadus Tului "*Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*" *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, Vol.7, No.3
- Tobrani Imam Suprayogi, "*Metode Penelitian Sosial Agama*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003). h.193.
- Tri Ratnawati, "*Pemerataan Daerah Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.15-16
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wisudarini. S & Riyanto “*Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, (Ridwan Institute:20-09-2021), Vol 6, No.9

Yusuf Qardhawi, “*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*”, (Jakarta: 1995)

